



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP
ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

TESIS



Febri Admiral
04 140 208

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2009

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA

DALAM TAHAP ASIMILASI

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)

(Febri Admiral, BP : 04 140 208, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2009)

ABSTRAK

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberikan cap (stigma) jahat kepada dirinya. Karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami kemiskinan dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidananya. Hal inilah yang disebut sebagai asimilasi atau pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan tujuan pemidanaan yang seperti inilah maka negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya mengakomodasi upaya pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat ini. Beberapa peraturan yang dianggap sangat berpengaruh dalam pembauran narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan alasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang? *kedua*, apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang? *ketiga*, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan *yuridis empiris*. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat dideskripsikan tentang pelaksanaan program asimilasi narapidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: *pertama* pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang umumnya berbentuk asimilasi kerja dengan pihak ketiga, *kedua*, banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi, *ketiga*, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pelancaran program asimilasi sudah cukup baik meskipun keluwesan dalam pelaksanaannya terkekang pada kerangka hukum yang ada, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN YANG MAHA KUASA karena atas berkat dan rahmat-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada ibuku tercinta yang selama ini telah membesarkanku seorang diri dan kepada kedua saudaraku terkasih dan segenap keluarga besarku. Selama menyelesaikan penulisan skripsi dan mengikuti pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. H. Najmi, SH. MH. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. H. Ilhamdi Taufik, SH. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Rembrandt, SH. MPD. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Yoserwan, SH, MH, LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Fadillah Sabri, SH. MH, selaku Pembimbing I yang membimbing dan memberi banyak masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Efren Nova, SH. MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga selaku Pembimbing II yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak-Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bazmanizar, Bc. IP, SH. MM, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
10. Yunifar, SH. selaku Staf Bimaswat yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu penulis mendapatkan data-data dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
11. Zaldiarmon, SH dan Hendrizal, SH, selaku petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang atas kesediaannya membantu penulis dalam beradaptasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
12. Bapak Monang Nainggolan selaku pengawas asimilasi kerja narapidana atas masukan dan bantuannya.
13. Saudara Hari Prianata atas kerjasamanya menjawab pertanyaan yang diajukan penulis perihal asimilasi dirinya

14. Teman-teman dan pihak lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini hanyalah bagian kecil dalam upaya penggalan ilmu yang selama ini penulis jalani, sehingga tidak luput dari segala kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan kemaslahatan para narapidana.

Padang, 26 Februari 2009

Penulis,

Febri Admiral



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan.....	14
1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan.....	14
2. Proses Pemasyarakatan.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.....	23
1. Pengertian dan Asas Pembinaan Narapidana.....	23
2. Tahapan Pembinaan Narapidana.....	27

C. Tinjauan Umum tentang Asimilasi	31
1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan	
Asimilasi Narapidana.....	31
2. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana.....	35
3. Syarat-syarat Asimilasi Narapidana.....	36
4. Pengawasan, Pencabutan Izin Asimilasi dan Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar	
Ketentuan Asimilasi Narapidana.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana	
dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan	
Klas II A Padang.....	41
B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi	
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	
Klas II A Padang.....	47
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Muncul	
dalam Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan	
Klas II A Padang.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

- 1) Kepolisian yang mengurus proses penyidikan;
- 2) Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
- 3) Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis;
- 4) Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana¹, yaitu:

- 1) *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 2) *Restraint*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- 3) *Reformasi*, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
- 4) *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi terbaru (*The New Penology*) yang menganut paham *Reintegrasi Sosial* (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut²:

- 1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 28.

² Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal 108

- 2) Konsepsi pemasyarakatan menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat.
- 3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diawali oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi sosial prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (seperti pepatah *jika sayang anak jangan sayang rotan*) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai menampung pelanggar hukum.
- 4) Pembinaan pelanggar hukum yang terpidana berdasarkan konsepsi pemasyarakatan tidak cukup hanya dilakukan setelah pelanggar hukum yang bersangkutan dijatuhi pidana. Pemberian pembinaan yang prinsipil harus sudah dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak pelanggar hukum ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Adapun bentuk pembinaannya meliputi program diversifikasi, probasi informal, dan intervensi sebelum persidangan.

Di Indonesia sendiri upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, dan pejabat negara terkait, seperti pada tanggal 5 juli 1963 ketika Sahardjo, selaku Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar Doctor Honoris causa-nya dalam pidatonya mengatakan beberapa hal yang dapat menjadi dasar kelahiran

pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan (juga tersirat upaya asimilasi narapidana), beberapa diantaranya adalah³:

- Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.
- Memperlakukan narapidana ialah harus dari sudut pandangan kepribadian bangsa Indonesia yang memandang:
 1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
 2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
 3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran mengenai asimilasi, khususnya asimilasi kerja yang nantinya diharapkan dapat membantu perekonomian narapidana dan keluarganya dengan upah atau penghasilan yang didupatkannya dari kerjanya.

³ Sanusi Has, *Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Medan: Monora, 1976, hal 65

- Perlakuan terhadap narapidana agar dapat dikembalikan kemasyarakat ialah dengan mendidik narapidana tersebut antara lain dengan cara:
 1. Selama ia hilang kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
 2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawaban kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.
 3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.

Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. Program ini disebut dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai pembauran. Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaanya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya

dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi degan judul **“PELAKSANAAAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka penulis berupaya untuk membahas beberapa pokok pemasalahan perihal asimilasi narapidana dalam pengajuan usulan skripsi ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang penulis rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam usulan pembuatan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Dalam rangka melengkapi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas sesuai dengan program kekhususan yang telah penulis tekuni selama ini yaitu Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serta pengetahuan penulis secara sistematis dan ilmiah berdasarkan ilmu yang diterima selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum di atas, penulis juga memiliki tujuan khusus dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai asimilasi narapidana.
- b. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui, menyadari, dan ikut membantu narapidana agar nantinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi orang yang baik karena tidak dikucilkan dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
- c. Bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana diharapkan agar dapat lebih memperhatikan masalah pembedaan dalam artian cara penanganan para tahanan dan narapidana, jangan hanya lebih bersifat memfokuskan diri terhadap proses formil beracara dalam penanganan sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum belaka.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah.

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang

diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang *yuridis empiris*, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan, yang dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Selain itu, penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis akan bersifat *deskriptif*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A.

2. Sumber Data

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur.

Wawancara ini ditujukan kepada narapidana yang sedang dalam tahap melakukan asimilasi dan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2) Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04 – 10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, juklak dan lain-lain yang berhubungan dengan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan wawancara pegawai atau pihak yang berwenang dalam mengurus asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

A. Wawancara (*Interview*)

Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten ini adalah sebagai berikut:

1. Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
2. Petugas Pemasyarakatan, dalam hal Staf Bimaswat yang berkompeten dalam pengurusan asimilasi dan pegawai yang ditugaskan mengawasi narapidana yang berasimilasi.
3. Narapidana yang melaksanakan asimilasi.

B. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *derskriptif*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode *kualitatif*, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka- angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian, tujuan, fungsi serta proses pemasyarakatan; pengertian, asas dan tahapan pembinaan narapidana; pengertian, tujuan, bentuk, syarat, pengawasan dan pencabutan asimilasi narapidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah penulis rumuskan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah-masalah yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

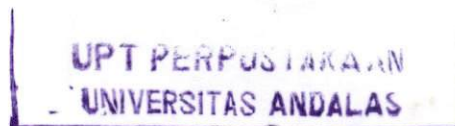
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warganegara agar hak asasinya mendapatkan perlindungan dari negara. Dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warganegaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum (pelanggaran hukum). Dengan demikian, hak warganegara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai *hak konstitusional* setiap warganegara Indonesia.

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor



X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia⁴.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

⁴ *Opcit*, hal 98

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa:

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Menurut Baharuddin Soerjobroto (alm), selaku pensiunan praktisi pemasyarakatan dan terakhir sebagai dosen senior luar biasa FISIP UI, menyatakan bahwa gerak usaha pemasyarakatan meliputi perspektif yang luas dan perspektif yang sempit⁵. Dalam perspektif yang luas, pemasyarakatan bergerak di bidang pembinaan pelanggaran hukum sejak

⁵ *Ibid*, hal 98

saat yang bersangkutan ditangkap sampai saat ia secara penuh berada kembali di tengah masyarakat. Sedangkan dalam geraknya yang sempit masyarakatan bergerak di bidang pembinaan pelanggar hukum terpidana. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa pembinaan pelanggar hukum dalam arti sempit ini diragukan keberhasilannya kalau tidak dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum dalam arti luas.

Tidak lain karena pelanggar hukum yang bersangkutan sebelum dikenakan pidana telah mengalami prose fragmentaris dan yang menyebabkan ia kemudian memperoleh statusnya sebagai orang terpidana. Sehubungan dengan adanya posisi pembinaan ini, dikenal adanya usaha-usaha pembinaan pelanggar hukum sebelum *adjudikasi* (putusan hakim) dan usaha-usaha pembinaan sesudah adjudikasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya masyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by omission*) terhadap hak konstitusional warganegara sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan;

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Pasal 28 I menyatakan;

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.

Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui *social participation, social support, dan social control*.

Dalam paham re-integrasi sosial menurut Purnomo (1983 : 254), dikatakan bahwa:

Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya *prisonisasi* (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), *stigmatisasi* (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan *residivisme* (pengulangan perilaku jahat)⁶.

2. Proses Pemasyarakatan

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka harus ada petunjuk teknis yang dapat berguna sebagai pedoman atau petunjuk pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, seperti tertuang dalam Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia" maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini⁷:

a). Tahap Orientasi / Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihalnya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

⁶ *Ibid*, hal 94

⁷ Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 99.

b). Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari $\frac{1}{3}$ masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c). Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

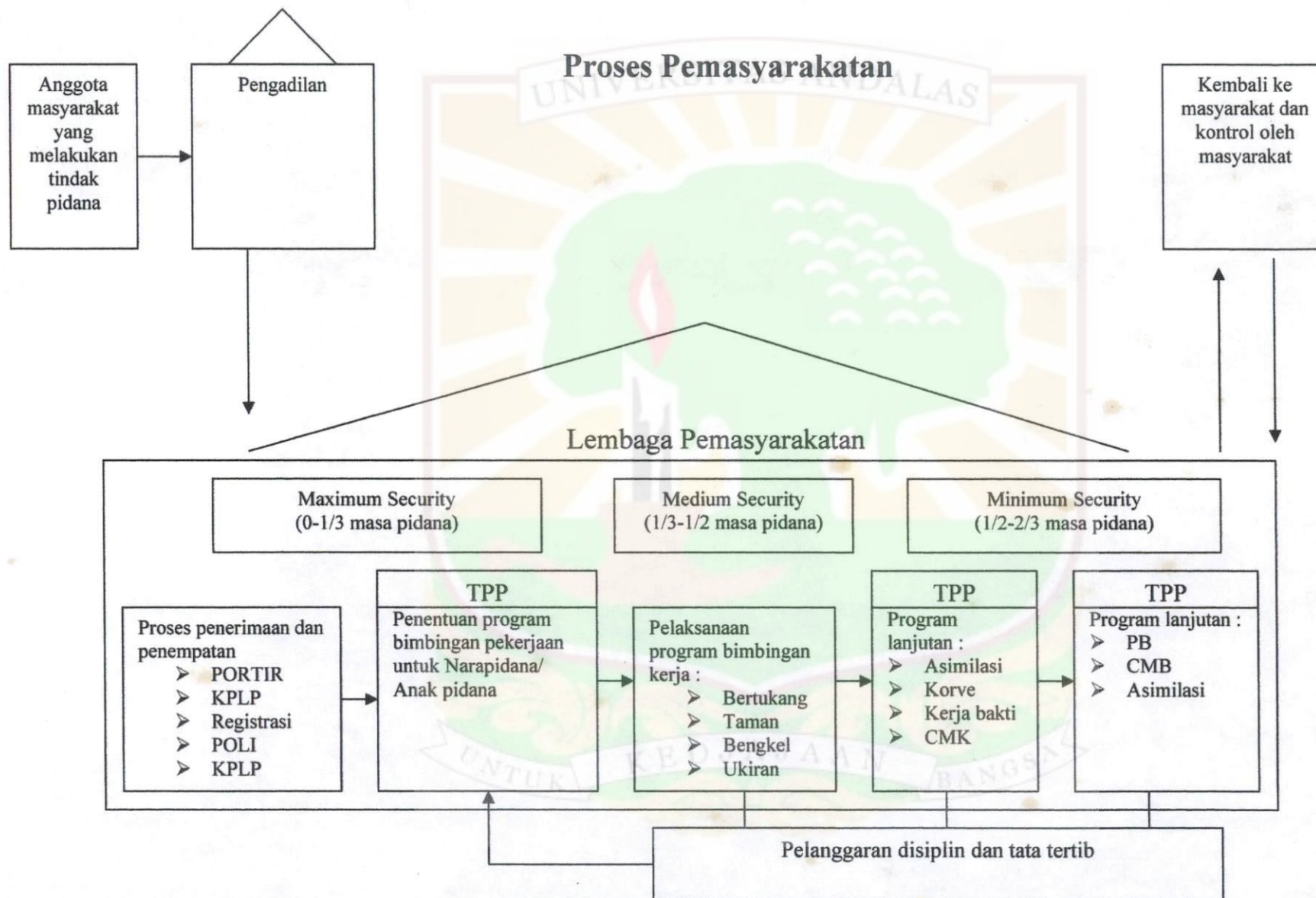
Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi,

maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d). Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

Berikut ini adalah gambaran dari proses pemasyarakatan :



B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian dan Asas Pembinaan Narapidana

Perlindungan hak asasi pelanggar Hukum Internasional yang ditetapkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 pada pasal 10 ayat (3) menyatakan: sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana.

Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya. Oleh sebab itulah dalam Sistem Pemasyarakatan menganggap bahwa wadah pembinaan narapidana yang paling ideal adalah masyarakat.

Sejalan dengan prinsip ini maka dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dinyatakan secara jelas dan limitatif berbagai hak narapidana, termasuk hak mendapatkan pembinaan di tengah-tengah masyarakat yakni hak asimilasi, hak mengunjungi keluarga, hak cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang negatif dari pemenjaraan.

Sedangkan di sisi lain secara bertahap ia diberikan pelatihan untuk menerima tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam kegiatan bermasyarakat.

Hal ini sesuai dengan angka 60 Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (standar perlakuan terendah narapidana) yang menyatakan:

- a. Pengaturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan di antara kehidupan lembaga pemasyarakatan dengan kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggungjawaban para narapidana atau penghormatan karena martabat mereka sebagai insan manusia.
- b. Sebelum selesainya hukuman, sebaiknya perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin dari narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat. Sasaran ini mungkin dicapai tergantung pada kasus itu dengan suatu pengaturan pra-pembebasan yang diorganisir dalam lembaga yang sama atau pada lembaga yang lain yang tepat atau dengan pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung dengan bantuan sosial yang efektif.

Di dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.



Untuk dapat melandasi program pembinaan narapidana, maka negara menuangkan dalam pasal 5 UU No. 12/95 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan perihal asas-asas pembinaan diatas adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.



Yang dimaksud dengan “penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Tahapan Pembinaan Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/95, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan:

- a. secara intramural (di dalam LAPAS); dan
- b. secara ekstemural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut *asimilasi*, pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut *integrasi*.

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

- a. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- (1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- (3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
dan
- (4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- (2) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- (3) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- (4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- (1) Perencanaan program integrasi;
- (2) Pelaksanaan program integrasi; dan
- (3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap Integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 (sembilan) bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap, dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap

dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:

- a. dana pembinaan;
- b. perlengkapan ibadah;
- c. perlengkapan pendidikan;
- d. perlengkapan bengkel kerja;
- e. perlengkapan olahraga dan kesenian.

Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan dibagi dalam berbagai klasifikasi dan spesifikasi.

Yang dimaksud dengan “klasifikasi LAPAS” adalah pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.

Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam sidang ini Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.



Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan “pembinaan khusus” meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti.

C. Tinjauan Umum tentang Asimilasi

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Asimilasi Narapidana

Sebelum membahas pengertian asimilasi narapidana, terlebih dahulu akan dibahas pengertian asimilasi dari tinjauan sosiologi, yakni sebagai berikut:

Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi corak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama-kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan suatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi.⁸

⁸ J.B.C.F. Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkasan*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, Cetakan IX, 1979, Hal 198.

Asimilasi narapidana dapat dilakukan oleh individu maupun secara kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak, yakni:

Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi dimana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antara kelompok maupun antara individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka ragam.

Asimilasi terjadi antara kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya.⁹

Pendapat ini diamini juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan bahwa:

Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Hak ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaanya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.¹⁰

Dari pengertian ini, jika dihubungkan dengan asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa narapidana sebagai subjek diharapkan dapat meresapi

⁹ *Ibid*, hal 199.

¹⁰ R. Achmad S. Soemadiprdja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hal 13-15.

kebudayaan dalam masyarakat dan dapat meleburkan diri dan berkembang bersama masyarakat tanpa merasa dikucilkan dengan status hukumnya.

Selanjutnya penulis akan membahas pengertian narapidana sebelum menguraikan pengertian asimilasi narapidana.

Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah:

Warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana/ tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.¹¹

Dari uraian pengertian asimilasi dan narapidana, dapat disimpulkan bahwa asimilasi narapidana merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah:

Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.¹²

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah:

Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

¹¹ Baharuddin Soerjobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992, hal 23.

¹² Ismael Saleh, *Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1987, hal 3

- 1). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 5). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah:

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

2. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana

Dalam pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaannya berada di luar lembaga, yakni sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai proses peningkatan pembinaan yang berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya serta telah melalui penilaian-penilaian tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Bentuk-bentuk asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa:

- 1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan.

Dalam kegiatan ini, pengawalan narapidana secara minimum security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa sewaktu narapidana berangkat kerja dan menjemputnya untuk kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Asimilasi dengan pihak ketiga dapat memupuk kepercayaan diri narapidana untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan

mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat menjadi suatu kemajuan berarti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan;

- 2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya.

Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu;

- 3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum.

b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan diluar LAPAS

c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti:

- 1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
- 2) berolahraga bersama dengan masyarakat;
- 3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat.

3. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana

Narapidana atau dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk persyaratan administratif berupa:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. Surat keterangan asli dari kejaksan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;



- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
- h. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.

Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya, diduga akan melakukan tindak pidana lagi, sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

4. Pengawasan, Pencabutan Izin Asimilasi dan Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Asimilasi Narapidana

Untuk pengawasan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas pasal 21), untuk warga negara asing, asimilasi narapidana mengikutsertakan kantor imigrasi setempat (KepMen Kehakiman Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 25).

Seterusnya Kepala LAPAS berkewajiban melakukan evaluasi perihal pelaksanaan asimilasi, melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi, memelihara data pelaksanaan asimilasi kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 26-27).

Alasan asimilasi dapat dicabut apabila (KepMen Kehakiman Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 29):

- a. Malas bekerja;
- b. Mengulangi tindak pidana;

- c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi.

Apabila alasan pencabutan asimilasi disebabkan karena narapidana melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS melaporkan kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (KepMen Kehakiman Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 32).

Sanksi yang diberikan untuk narapidana yang telah dicabut izin asimilasinya antara lain:

- a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
- b. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Sesuai dengan prinsip pemasyarakatan bahwa selama narapidana menjalankan pidana hilang kemerdekaan (penjara), maka si narapidana tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan haruslah dikenalkan dan diberikan kesempatan untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas, maka dengan proses asimilasi yang merupakan proses untuk membaurkan narapidana kedalam lingkungan masyarakat agar si narapidana merasakan kehidupan yang normal dan dapat berinteraksi secara wajar sebagaimana mestinya. Masyarakat sendiri diharapkan juga dapat menerima si narapidana ke lingkungan mereka agar membantu pemulihan hubungan sosial narapidana sehingga nantinya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, si narapidana tidak merasa dikucilkan dan menjalani hidup yang lebih baik nantinya.

Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang pada tanggal 24 Februari 2009 terdapat 834 orang yang menjadi penghuni. Berikut ini adalah rincian penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang:

TABEL PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG
PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2009

Penggolongan Berdasarkan Status Hukum dan Banyaknya (dalam orang)		Penggolongan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Banyaknya (dalam orang)		Penggolongan Berdasarkan Kategori Usia dan Banyaknya (dalam orang)	
Narapidana	394	Laki-laki	799	Dewasa dan Pemuda	808
Tahanan	440	Perempuan	35	Anak	26
Jumlah	834	Jumlah	834	Jumlah	834

Penggolongan Tindak Pidana Penghuni LP Klas II A Padang		Banyaknya (dalam orang)
A. Napi Pidsus	Politik	0
	Penyelundupan	0
	Perjudian	17
	Korupsi	4
	Narkotika	123
	Psikotropika	36
B. Napi dengan Pidana Biasa (sesuai KUHP)		214
C. Tahanan Pidsus	Politik	0
	Penyelundupan	0
	Perjudian	168
	Korupsi	11
	Narkotika	56
	Psikotropika	22

D. Tahanan dengan Pidana Biasa (sesuai KUHP)	183
E. Anak Negara	0
F. Anak Sipil	0
G. Pidana Mati	0
H. Seumur Hidup	0

Sumber: Sub. Si. Registrasi Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Padang

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sendiri tentunya juga mempunyai harapan yang sama dengan prinsip pemasyarakatan diatas. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif, seperti berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, telah menjalani 1/2 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dan lain-lain, khusus untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana (diatur dalam pasal 36 ayat 4 PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Para narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif ini haruslah juga memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan seperti salinan vonis, laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) perihal pihak yang nantinya menerima narapidana dalam pelaksanaan asimilasi, juga jaminan dari pihak

keluarga seperti surat-surat berharga, kemudian setelah persyaratan substantif dan administratif ini terpenuhi narapidana dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimaswat, dimana nantinya setelah mendengar pendapat dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumbar. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumbar inilah yang nantinya memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi dari narapidana. Apabila diterima, nantinya Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumbar akan meneruskan usulan ini kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, maka narapidana dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi narapidana ini bentuknya bervariasi pula sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti: bekerja di luar lapas, mengikuti pendidikan, dan mengikuti kegiatan sosial.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang bentuk kegiatan asimilasi yang ada selama periode 2008 hanyalah asimilasi kerja dengan pihak ketiga. Untuk narapidana yang bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan pihak ketiga ini, diperlukan surat permohonan dari pihak keluarga narapidana, surat keterangan dari lurah setempat yang memastikan domisili dari keluarga, surat permintaan tenaga kerja, surat pernyataan kesanggupan mengawasi narapidana yang akan asimilasi, surat perjanjian tanda kesanggupan dan rincian

besaran upah yang diberikan pihak ketiga (perusahaan atau CV) yang akan mempekerjakan narapidana tersebut dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, untuk bekerja mandiri hanya memerlukan surat jaminan pihak berwenang setempat untuk mengawasi, seperti dari kelurahan¹³.

Mengenai upah, nantinya narapidana akan memberikan setengah dari upahnya untuk negara melalui Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Selama tahun 2008 tercatat ada 3 orang narapidana yang melaksanakan asimilasi, dimana ketiganya bekerja dengan pihak ketiga. Berikut ini adalah data narapidana yang melaksanakan asimilasi pada tahun 2008:

NAMA	JUHERMANTO	AKMAL ABBAS	HARI PRIANATA
UMUR (TAHUN)	29	38	21
NO. REGISTER	B.I.214/07	B.I.128/05	B.I.195/07
TANGGAL MULAI ASIMILASI	28 MEI 2008	27 MEI 2008	2 DESEMBER 2008
TEMPAT ASIMILASI	BIRO LOGISTIK POLDA SUMBAR	WISMA PURI GRUP	CV. VENUS PADANG
PETUGAS PENGAWAS	MONANG NAINGGOLAN	IRZAL	FIRDAUS

Sumber: Sub. Si. Bimaswat

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Dalam melaksanakan asimilasi dengan pihak ketiga, seperti yang saudara Hari Prianata lakukan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang menunjuk satu orang pegawai untuk mengawasi satu orang narapidana yang

¹³ Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 16 Januari 2009

melaksanakan asimilasi, pegawai ini berpakaian biasa agar tidak mencolok dan nantinya bertugas mengantarkan narapidana yang melaksanakan asimilasi ke tempat melaksanakan asimilasi bersama dengan pihak ketiga (perusahaan) dan menjemputnya kembali pulang ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang setelah jam kerjanya selesai. Pegawai ini juga nantinya memberikan laporan pengawasannya ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Berdasarkan laporan inilah nantinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang atas nama Menteri Hukum dan HAM dapat memutuskan apakah si narapidana dapat melanjutkan asimilasinya atau dicabut asimilasinya.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sendiri juga ada satu bentuk asimilasi yang dilaksanakan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang wewenangnya berada sepenuhnya di tangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Bentuk asimilasi ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada narapidana dan juga memberikan kelonggaran di dalam lembaga agar dapat berhubungan dengan sesama penghuni lain blok, dengan pegawai, dan juga dengan masyarakat. Kegiatannya dapat berupa *bezoek*, hiburan dan ceramah dari pihak luar, serta dapat dipekerjakan sebagai *pemuka* yang diberi kepercayaan membantu pekerjaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Pemuka ini dapat langsung berhubungan dengan masyarakat yang berkepentingan dengan bagian dimana si pemuka ditugaskan, seperti Bapak Edi dan Bapak Awi yang membantu perihal administrasi di bagian Bimaswat; mereka inilah yang

nantinya diandalkan oleh pegawai untuk mengurus pengurusan surat menyurat untuk asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga. Untuk pemuka sendiri di dalam menjalankan tugasnya membantu pekerjaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang juga mendapatkan remisi tambahan yang dapat dimasukkan dalam kategori melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Selain beberapa hal diatas, juga terdapat bimbingan kerja (bimja) yang berguna untuk pelatihan kerja dan pemanfaatan waktu luang. Bimja ini juga menghadirkan para pihak luar yang dapat memberikan pelatihan, sehingga komunikasi dengan pihak luarpun dapat terus berjalan. Narapidana yang mendapatkan asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ini jika tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin nantinya dapat diprioritaskan untuk mendapatkan asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Dalam setiap pelaksanaan asimilasi ditemukan berbagai kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya program asimilasi, kendala ini dapat berasal dari intern Lembaga Pemasyarakatan dan juga ekstern lembaga pemasyarakatan, seperti beberapa hal yang dapat penulis uraikan berikut ini berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak:



1. Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan yang ada¹⁴.

Kurang efektif dan efisiennya peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hal-hal seperti rumit dan lamanya prosedur mendapatkan izin asimilasi seperti: surat pengajuan asimilasi dari pemohon (narapidana), surat keterangan domisili keluarga dari kelurahan, surat permintaan tenaga kerja dari pihak ketiga (asimilasi bekerja pada pihak ketiga), surat pernyataan kesanggupan mengawasi, dan surat perjanjian pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan pihak ketiga yang ingin mempekerjakan narapidana. Selain prosedural, pembagian besaran upah antara narapidana dan pihak LAPAS dirasakan kurang *fair* (50-50), juga ada persyaratan asimilasi untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional yang terorganisasi boleh melakukan asimilasi jika telah menjalani 2/3 masa pidana (PP No. 28 Th. 2006), sehingga membuat narapidana yang termasuk kategori diatas lebih memilih pembebasan bersyarat daripada asimilasi dimana untuk pembebasan bersyarat sendiri juga mempunyai persyaratan 2/3 masa pidana yang telah dijalani.

2. Minimnya atau kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja¹⁵.

¹⁴ Wawancara dengan Hari Priyana selaku narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja, 24 Februari 2009

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yunifur selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 24 Februari 2009

Dana yang dialokasikan untuk keperluan pelatihan kerja atau keterampilan sangat sedikit sehingga fasilitas (alat kerja) yang didapatkanpun jauh dari memuaskan dan kurang beragam, selain untuk keperluan alat kerja, yang sangat memprihatinkan adalah juga keterbatasan jumlah dan kualitas bahan baku yang nantinya akan diolah oleh narapidana di bengkel kerja. Dalam hal ini sebagaimana yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa seringkali bahan yang dipakai untuk kegiatan kerja adalah bahan yang tidak layak pakai, seperti: kayu yang akan dipakai untuk membuat kusen atau meja berasal dari kayu dengan kualitas biasa dan seadanya, bahkan menurut pengakuan para narapidana yang berkegiatan di bengkel kerja, mereka juga pernah membuat barang dengan bahan baku bekas atau sudah mulai rusak yang layakannya sebagai sisa-sisa pertukangan. Padahal dengan fasilitas kerja yang ada di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ini nantinya diharapkan agar narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan terampil sehingga dapat mencerminkan keberhasilan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

3. Belum adanya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat menjadi pembimbing narapidana¹⁶.

Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman dalam membimbing narapidana (*tutor*) sangat berguna agar dapat terjadi *transfer of skill* yang

2009 ¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 24 Februari

berguna bagi narapidana nantinya, khususnya untuk narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja. Selama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang mengalami kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk menjadi pembimbing narapidana dikarenakan juga dengan minimnya ketersediaan dana untuk memakai jasa tutor profesional.

Selain tutor ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari psikolog yang dapat berguna untuk membimbing mental narapidana untuk melaksanakan pidananya dan menggali lebih jauh minat dan keterampilan narapidana yang nantinya dapat digunakan dalam asimilasi kerja

4. Belum adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak ketiga yang dapat menampung para pemohon asimilasi agar dalam pelaksanaan asimilasi dapat lebih terakomodir¹⁷.

Asimilasi kerja dengan pihak ketiga merupakan bentuk asimilasi yang paling potensial untuk membantu narapidana yang ingin berasimilasi, akan tetapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang mengalami kendala dalam upaya kerjasama yang lebih *continuity* (berkelanjutan), hal ini terjadi karena pihak ketiga merasa takut untuk memakai jasa dan tenaga para narapidana, ataupun pihak ketiga yang tidak ingin repot dengan membuat perjanjian dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang perihal jaminan pengawasan kerja¹⁸.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 24 Februari 2009

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Monang Nainggolan selaku pengawas narapidana yang berasimilasi kerja, 24 Februari 2009

Padahal para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ini kebanyakan dihuni oleh orang-orang yang masuk dalam kategori usia produktif. Selama ini pihak yang memakai jasa dan tenaga para narapidana hanyalah pihak yang mempunyai hubungan kerabat dengan narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja dengan pihak ketiga.

5. Pandangan (*stigmatisasi*) masyarakat yang buruk terhadap narapidana¹⁹.

Pandangan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi narapidana. Walaupun asimilasi kerja dilakukan, tetapi masyarakat juga akan memberikan pandangan sinis terhadap pihak yang memperkerjakan narapidana.

Terlebih dengan budaya masyarakat kita yang komunal sehingga pandangan satu orang dapat menjadi pandangan masyarakat secara umum.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Muncul

dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Dalam hal untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam upaya pelaksanaan asimilasi narapidananya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dengan segala cara dan upaya telah mencoba agar dapat menunjang dan mendorong berjalannya asimilasi dengan lancar. Berikut ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Monang Nainggolan selaku pengawas narapidana yang berasimilasi kerja, 24 Februari 2009

pelaksanaan program asimilasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yaitu:

1. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk meringankan prosedural dari perundang-undangan²⁰.

Alternatif yang dapat diberikan untuk meringankan proses pengajuan asimilasi seperti: memberikan contoh surat-surat yang diperlukan untuk pengajuan asimilasi, dengan adanya contoh surat ini diharapkan si pemohon ataupun pihak ketiga yang bersedia memernima si narapidana nantinya dapat lebih mudah dalam menyusun surat-surat yang diperlukan.

2. Mengupayakan penambahan anggaran dan penjualan produk bimbingan kerja²¹.

Melalui program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang akan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan narapidana yang ingin beraktivitas daripada duduk termenung menghabiskan hari di dalam kamar. Di tempat bimbingan kerja atau disebut juga bengkel kerja inilah para narapidana dapat beraktivitas seperti: melakukan pertukangan kayu, mulai dari membuat meja, kursi, lemari, kusen, pintu kayu, dan lain-lain. Selain pertukangan kayu, di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang juga ada kegiatan membuat hollowbrik dan bercocok tanam.

20 Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 16 Januari 2009

21 Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 16 Januari 2009

Untuk narapidana wanita juga ada kegiatan memasak atau berjualan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, membuat keset dari kain perca dan juga membuat berbagai macam jahitan yang bernilai jual lainnya walaupun dengan tempat yang sempit dan dana yang minim.

Karena tempat yang sempit dan dana yang minim inilah maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang mencari jalan keluar lain, diantaranya seperti: mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Departemen Hukum dan HAM, meminta bantuan alat-alat atau sarana kerja dari pemerintah daerah ataupun dari pihak swasta, dan menyediakan tempat yang dapat dipergunakan sebagai *showroom* untuk memamerkan hasil buatan tangan narapidana yang diharapkan mampu menarik minat baik konsumen maupun dari pihak yang memproduksi barang yang serupa sehingga mau memakai jasa dan tenaga para narapidana yang dengan ini dapat mendukung kesuksesan program asimilasi.

3. Penyediaan tenaga ahli alternatif²²

Selain sarana kerja, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang juga mengakali penyediaan tutor kerja dan keterampilan yang profesional dan memerlukan bayaran dengan pelatihan kerja yang diberikan oleh pegawai yang juga menguasai suatu bidang kerja, juga

²² Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 24 Februari 2009

dengan mengandalkan para narapidana yang mempunyai keterampilan atau kecakapan dalam suatu bidang kerja sesuai dengan profesi yang ditekuninya sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ataupun para relawan yang dengan sukarela mau melatih para narapidana untuk peningkatan keterampilan kerja.

Untuk pelatihan pegawai, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang juga mengirimkan pegawai yang potensial untuk mengikuti seminar-seminar baik seminar pengetahuan, kepemimpinan, maupun seminar kepelatihan kerja yang dapat berguna untuk diterapkan dalam mendampingi dan membimbing narapidana yang melaksanakan asimilasi kerja

4. Menjalin kerjasama dengan pihak luar²³.

Upaya menjalin kerjasama dengan pihak luar terus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, seperti mengajak pihak ketiga yang mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja memakai jasa dan tenaga dari narapidana lain yang masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Selain itu juga pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang mendorong agar Departemen Tenaga Kerja untuk lebih serius dalam pencarian mitra kerja untuk menampung kegiatan asimilasi kerja.

²³ Wawancara dengan Bapak Monang Nainggolan selaku pengawas narapidana yang berasimilasi kerja, 24 Februari 2009

5. Mengadakan dan mengikuti narapidana dalam berbagai kegiatan sosial, jasmaniah, spiritual dan sebagainya untuk menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana²⁴.

Mengikutsertakan narapidana dalam setiap acara-acara dan perayaan yang dilaksanakan masyarakat sekitar untuk memupuk rasa saling percaya antara narapidana dan masyarakat agar menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam urusan kerohanian narapidana, diantaranya dengan pihak IAIN dan pihak gereja yang dapat membantu pemupukan moralitas dan spiritual narapidana.

Meskipun secara langsung bimbingan rohani ini tidak dapat membantu narapidana dalam hal pelatihan keterampilan kerja, akan tetapi dengan bimbingan rohani ini diharapkan dapat memotivasi para narapidana agar mau berusaha dan berkerja ataupun meningkatkan keterampilan kerjanya selama menjalani masa pidananya, serta juga dapat memberikan ketenangan batin para narapidana yang kehilangan kemerdekaannya.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yunifar selaku Staf Bimaswat LAPAS Padang, 24 Februari 2009

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang umumnya berbentuk asimilasi kerja dengan pihak ketiga. Pengajuan asimilasi ini sendiri dirasakan rumit dengan prosedural yang panjang.
2. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi. Kendala-kendala ini bisa berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, atau mungkin juga berasal dari diri narapidananya sendiri, seperti ketidakinginan untuk beasimilasi, sikap apatis narapidana, dll.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pelancaran program asimilasi sudah cukup baik meskipun keluwesan dalam pelaksanaannya terkekang pada kerangka hukum yang ada, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.



B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis agar dapat membantu perbaikan kearah yang lebih baik, antara lain:

1. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk dapat meringankan prosedural pengajuan asimilasi, dan mencari alternatif pelaksanaan asimilasi, seperti pembukaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang akan lebih banyak menampung narapidana untuk asimilasi kerja.
2. Harus ada sinergi yang strategis antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, narapidana, dan masyarakat agar dapat menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan asimilasi narapidana.
3. Harusnya ada keluwesan ruang gerak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam upaya pemenuhan kebutuhan lembaga sendiri karena hanya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang sendiri yang mengetahui dan mengerti kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Baharuddin Soerjobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1972.
- Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, 1990.
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ismael Saleh, *Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997.
- J. B. C. F. Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkasan*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Cetakan IX, 1979.
- Membuat Standar-Standar Bekerja*, Inggris, Penal Reform International, 2001.
- R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Sanusi Has, *Penologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Medan: Monora, 1976.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04. 10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.





KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA PADANG
Nomor : W3.EB-PK.01.05.04-23TAHUN 2008
TENTANG

PEMBERIAN IZIN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

Menimbang : Bahwa ada alasan dan syarat-syarat yang cukup untuk memberikan Izin Asimilasi kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan;
- 2. Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasysarakatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasysarakatan Nomor : E.PK.04.10-75 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasysarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tanggal 16 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG TENTANG PEMBERIAN IZIN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA

PERTAMA

: Memberikan Izin Asimilasi kepada Narapidana yang Namanya tercantum dalam lajur 2 dengan bentuk/ tempat tersebut pada lajur 5 dengan syarat khusus seperti tersebut pada lajur 6 mulai tanggal seperti tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini

KEDUA : Kepala Balai Pemasyarakatan Seperti tersebut pada lajur 7 untuk dapat melaksanakan pengawasan atas syarat khusus seperti tersebut pada lajur 6 lampiran Keputusan ini

KETIGA : Memerintahkan Kepada **CV VENUS** untuk membuat perjanjian kepada pihak Lapas Klas IIA Padang yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat U.p Kepala Divisi Pemasyarakatan dan selanjutnya melaksanakan keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat Perjanjian yang tersebut pada diktum ketiga diatas dengan Ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan ini

UNIVERSITAS ANDALAS

Ditetapkan di : P A D A N G
PADA TANGGAL : 2 Desember 2008



BASMANIZAR Bc.IP,SH, MM
NIP. 040 044 738

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Up. Bapak Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan
Di - Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
Di Padang
3. Hakim Pengawas dan Pengamat PN Padang
4. Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Padang
5. Kepala Kepolisian Kota Besar Padang
6. Walikota Padang
7. Peringgal.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

SURAT PERJANJIAN ASSIMILASI

Nomor : W3.EB-PK.01.05.04.- 24 Tahun 2008

Pada hari ini Senin tanggal 17 November 2008 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : BASMANIZAR, Bc.IP,SH,MM
NIP : 040044738
PANGKAT / GOLONGAN : Pembina { IV / a }
JABATAN : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
ALAMAT : Jl. Muara No. 42 Padang
{ Bertindak untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang
Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama }

II NAMA : Ir. SURYA AIDIL
PEKERJAAN : Direktur CV VENUS
ALAMAT : Komplek Mutiara Indah No. 56 Lubuk Kilangan Padang
{ Dalam hal ini bertindak untuk CV VENUS yang Selanjutnya
disebut sebagai Pihak Kedua }

PASAL 1

Dalam rangka pembinaan lanjutan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai salah satu upaya mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Pembinaan Lanjutan Tersebut untuk bekerja di Perusahaan CV VENUS, Warga binaan Pemasyarakatan a/n :

NAMA : HARI PRIANATA PUTRA Pgl. HARI
UMUR : 21 Tahun
NOMOR REGISTER : B.I.195/07 (DWS)

PASAL 2

Pihak pertama memberikan pekerjaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut di CV VENUS sebagai staf di bagian editing.

PASAL 3

Pihak pertama menyiapkan keberangkatan WBP untuk menuju CV VENUS pada Jam 08.00 Pagi setiap hari kerja tidak termasuk hari minggu dan libur.

PASAL 4

Pihak pertama mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut selama bekerja dengan pihak kedua.

PASAL 5

Pihak kedua harus menjemput WBP tersebut ke Lapas Padang, mulai Jam 08.00 Wib dan Mengantar kembali ke Lapas Padang pada jam 17.00 wib serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang WBP selama bekerja pada pihak ke II (kedua)

PASAL 6

Pihak kedua sanggup untuk membina WBP tersebut untuk tidak melanggar hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat dan bekerja dengan baik.

PASAL 7

Pihak pertama dapat mencabut kembali perjanjian ini kalau Pihak kedua dan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mematuhi peraturan yang berlaku dimasyarakat dan peraturan yang sudah dibuat di Lapas.

PASAL 8

Pihak Kedua memberikan gaji sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada WBP dan ½ (Setengah) dari gaji tersebut di berikan pada pihak pertama, sesuai dengan Kep. Menkeh RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007

PASAL 9

Pihak Kedua sanggup memberikan Jaminan berupa surat berharga, dengan ketentuan apabila Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut Melarikan Diri, maka surat berharga tersebut di Sita oleh Pihak I atau di Jual untuk kepentingan Negara.

PASAL 10

1. Segala sesuatu yang belum tercantum / di atur dalam surat perjanjian ini atau ada perubahan yang di pandang perlu oleh kedua belah Pihak, maka akan di atur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan perjanjian yang tidak dapat di pisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Semua biaya untuk surat perjanjian ini termasuk Materai, di tanggung seluruhnya oleh Pihak Kedua.

PASAL 11


1. Surat Perjanjian ini harus di Tanda Tangan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku tanggal : 26 November 2008
3. Surat Perjanjian Assimilasi ini di tanda tandani pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas.

Pihak Kedua


Ir. SURYA AIDIL



Pihak Pertama


BASMANIZAR, Bc.IP,SH,MM
NIP: 040044738

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

Alamat : Jln. Muara No.42 Padang
Telepon : (0751) 21343 - 30124

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG
Tanggal : 2 Desember 2008
Nomor : W3.EB-PK.01.05.04- 23 Tahun 2008

NO	NAMA DAN UMUR	NOMOR REGISTER	TANGGAL ASIMILASI	BENTUK DAN TEMPAT ASIMILASI	SYARAT KHUSUS	PEMBIMBING / PENGAWAS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HARI PRIANATA PUTRA PGL HARI 21 TAHUN	B.I.195/07 (DWS)	Sejak tanggal ditetapkan Surat Perjanjian antara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dengan CV VENUS PADANG	Bekerja pada Pihak Ke III yaitu CV VENUS PADANG	Agar mematuhi peraturan yang berlaku selama menjalani program Asimilasi	Bapas Klas I Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang	

Ditetapkan di : P A D A N G
Padang tanggal : 2 Desember 2008
KEPALA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PADANG
BASMANIZAR, Bc.IP,SH, MM
NIP. 040 044 738



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG
Jalan Muara No. 42 Telepon : (0751) 21343 Fax. 30124
Padang 25118

SURAT KETERANGAN RESEARCH
W3.EB.DL.02.01- 455

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang menerangkan bahwa :

Nama : FEBRI ADMIRAL
Tempat /Tanggal Lahir : Padang, 24 Februari 1986
Pekerjaan : Mahasiswa
Bp : 04140208
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Seberang Palinggam No. 37 Padang

Sesuai dengan surat :

1. Fakultras Hukum Universitas Andalas No. 1295/H.16.4/PP-2008
2. Kantor Wilayah Departemen hukum dan HAM Sumbar No. W3.DL.02.01-16

Telah selesai melaksanakan Penelitian Lapangan dan Pengumpulan Data, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 s/d 28 Februari 2009 di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Padang, guna mendapatkan bahan / data penelitian berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG “

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Februari 2009

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS IIA PADANG**



BASMANIZAR, Bc.IP,SH.MM.
NIP. 040 044 738



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail: fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1295 /H.16.4/PP-2008

1 Desember 2008

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Bapak Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumbar
2. Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: FEBRI ADMIRAL
No. BP	: 04140208
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. Seberang Palinggam No. 37 Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan dari tgl (2 Des. 2008 s/d 2 Maret 2009)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas. Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail: fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1295 /H.16.4/PP-2008
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/peneiitian**

01 Desember 2008

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan Ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

N a m a	: FEBRI ADMIRAL
Nomor BP	: 04140208
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jln. Seberang palinggam No. 37 padang
Pembimbing	: Fadillah Sabri, SH.,MH Efren Nova, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (2 Desember 2008 s/d 2 Maret 2009)
Tempat Penelitian	: Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs. yang bersangkutan
6. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 25111

REKOMENDASI

Nomor : 070. 15.54 / Kesbang.Pol/ 2008

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- Surat dari PD I Fakultas Hukum UNAND Padang
Nomor : 1295/H.16.4/PP-2008. Tanggal 1 Desember 2008
- Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 2 Desember 2008.

Sehubungan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: FEBRI ADMIRAL
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang / 24 Februari 1986
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jl. Seberang Palinggam No. 37
Maksud Penelitian	: Penulisan Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (Tiga) Bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Perumahan Kelas II A Padang
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	: Lembaga Perumahan Kelas II A Padang
Anggota Rombongan	: --

Sehubungan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
- Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
- Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik.
- Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 3 Desember 2008

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK



SURYA BUDHI SH

Perencana Tk. I, NIP. 050047513

Diteruskan kepada Yth.:

- Kakan. Wilayah Hukum dan HAM Prop. Sumatera Barat
- Kepala Lembaga Perumahan Kelas II A Padang
- PD I Fakultas Hukum UNAND Padang
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jalan S. Parman No. 256 Telp. (0751) 7055471 Fax. (0751) 7055510
PADANG - 25133

Nomor : W3.DL.02.01- 16
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian /Survey / Tugas
Akhir

Padang, 01 Desember 2008

Yth, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang
di -

Padang

Sehubungan surat Saudara Nomor : 1295/H.16.4/PP-2008 tanggal 01 Desember 2008 dan Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B.070/15-54/Kesbang.Pol/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal seperti tersebut pada pokok surat bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang :

Nama : **Febri Admiral**
NIM/BP : 41902/2003
Jurusan : Hukum Pidana
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang
Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Kami tidak berkeberatan Mahasiswa tersebut melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada hari / jam kerja.
2. Tidak mengganggu kegiatan rutin.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar yang berhubungan dengan objek Keamanan.
4. Wawancara dengan Narapidana apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.
5. Wawancara dengan Tahanan apabila atas seizin Instansi yang menahan dan apabila yang bersangkutan bersedia diwawancarai.
6. Hasil Penelitian hanya untuk bahan skripsi yang bersangkutan, tidak untuk konsumsi pihak ke tiga.
7. Menyampaikan satu exemplar hasil Penelitian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN,

BUDI SULAKSANA, Bc.IP, SH, M.Si
NIP. 040051079

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.